

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana pembangunan di Indonesia meliputi rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan regional. Dengan kata lain pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi agenda pemerintah pusat saja, melainkan suatu daerah juga melaksanakan pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Dalam konteks daerah pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Secara umum, pembangunan ekonomi diarahkan agar pendapatan masyarakat naik secara terus menerus yang di ikuti dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Akan tetapi pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi saja, melainkan proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, berupaya untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk yang lebih merata (Todaro, 2006).

Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, tidak terlepas hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan masalah ketimpangan. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingka

pengangguran (Todaro dalam Lestari, et.al, 2019). Akan tetapi di Indonesia, pembangunan ekonomi dilakukan lebih focus terhadap pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan, pengurangan terhadap ketimpangan masih sering diabaikan.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bila mana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terkebelakang (*underdeveloped region*) ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal, yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (sjafrizal, 2008).

Ketimpangan pendapatan sangat dirasakan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Pada tahun 2019, gini ratio Indonesia mencapai angka 0,391 dimana secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia masing sangat tinggi. Lebih khusus yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Sulawesi, menurut BPS pada tahun 2019 ada 3 provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas raso gini nasional yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak terdapat daerah yang memiliki

tingka ketimpangan yang rendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data ketimpangan pendapatan melalui gini rasio provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2019.

**Tabel 1.1**

**Rasio Gini Provinsi Di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019**

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380
Sulawesi Utara	0,366	0,379	0,394	0,304	0,376
Sulawesi Selatan	0,404	0,400	0,429	0,388	0,391
Sulawesi Tengah	0,370	0,347	0,345	0,317	0,330
Sulawesi Tenggara	0,381	0,388	0,404	0,392	0,393
Gorontalo	0,401	0,410	0,405	0,417	0,410
Sulawesi Barat	0,362	0,371	0,339	0,366	0,365

*Sumber: Badan Pusat Statistik.2021*

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan tiap tahun dan ketimpangan di masing-masing daerah di Pulau Sulawesi ini mengalami fluktuasi. Seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dimana rasio gini pada tahun 2015 sebesar 0.37, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.38 dan 0.39. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0.37 dan di tahun 2019 mengalami peningkatan di angka 0.38. Rasio gini di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebesar 0.42, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0.37. di tahun 2017 masih bertahan di angka 0.37, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 0.33, dan 2019 masih

staknan di angka 0.33. Sulawesi Tengah menjadi daerah yang memiliki rata-rata tingkat rasio gini terendah dibandingkan daerah yang lainnya. Sebaliknya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang memiliki rasio gini tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2015 gini ratio di Provinsi Gorontalo berada di angka 0,401 kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 0,410. Pada tahun 2017 menurun di angka 0,405 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 0,417, hingga tahun 2019 kembali di angka 0,410. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang berbeda di tiap daerah.

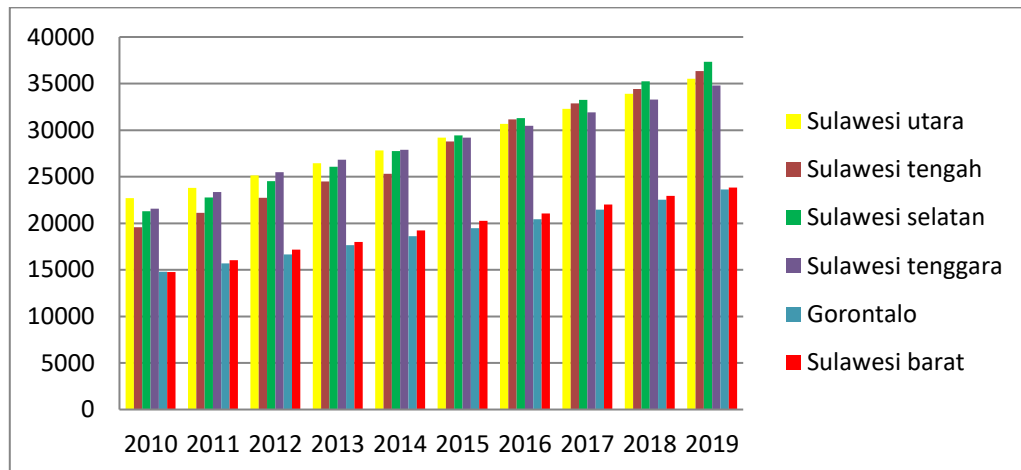
Selain untuk mengurangi tingkat ketimpangan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan setiap daerah kabupaten yang sudah maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar penduduk.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonominya maupun dari kontribusi sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut Pramulyawan (2010:16) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan membandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan, perubahan dalam 2 nilai pendapatan di setiap tahun tersebut disebabkan oleh

perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari pada yang dicapai pada waktu sebelumnya. Maka dari itu keberhasilan pembangunan ekonomi sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan masalah-masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan. Baiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial dapat diatasi.

Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya, hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi menjadi yang terbesar Sepanjang tahun 2019, Sulawesi juga merupakan pulau terbesar ke 11 didunia yang terdiri provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Berikut ini grafik PDRB per kapita Sulawesi



*Sumber : Badan Pusat Statistik.2021*

### **Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto per kapita Sulawesi 2010-2019**

Terdapat VI Provinsi yang berada di kepulauan Sulawesi antara lain: Sulawesi utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi barat. Selama kurun waktu 10 Tahun terakhir. Masing – masing Provinsi memiliki nilai yang bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat PDRB tertinggi berada di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2019 dan PDRB Terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010.

Sulawesi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda setiap tahunnya, laju pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer yaitu sektor utama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalan.

Sektor sekunder merupakan sektor yang berkaitan dengan sektor manufaktur, meliputi industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; serta konstruksi. Sektor tersier merupakan sektor penyedia layanan berupa jasa, meliputi transportasi pergudangan; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi makan dan minum dan lain-lain yang berhubungan dengan layanan jasa. Dari ketiga sektor ini menggambarkan bahwa sebagian besar kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Sulawesi berbeda-beda.

Sektor yang paling produktif dan paling berperan dalam memberikan kontribusi terbesar dalam terbentuknya ketimpangan pendapatan yaitu sektor industri manufaktur. Sedangkan sektor perhotelan, perdagangan, sektor bangunan, sektor relasi dan komunikasi memberikan kontribusi menengah kebawah terhadap pembentukan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan sektor yang tergolong kurang berkontribusi adalah sektor pertanian. Karena sektor tersebut memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan ketimpangan pendapatan di Indonesia, selain itu juga tingkat pendapatan pegawai di sektor tersebut relatif terdistribusi (Canon, 2012). Akan tetapi di pulau Sulawesi sektor industri masih tergolong rendah, dikarenakan masih kurangnya industri di Sulawesi. Sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan sudah dapat dikatakan sedikit maju, begitu juga dengan sektor jasa-jasa.

Oleh karena itu upaya mewujudkan pemerataan ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi sangat penting agar tujuan dari pembangunan yakni

peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup masyarakat dapat terwujud secara bersama-sama baik pada tingkat regional maupun nasional Oleh karena itu perlu di analisis lebih jauh mengenai hal tersebut, maka di ambil judul **PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN SE SULAWESI.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor primer terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi?
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor sekunder terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi?
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor tersier terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor primer terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor sekunder terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor tersier terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini, di antaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.